

ABSTRAK

Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola anggaran di Desa Kemukus di bawah kepemimpinan Kepala Desa Kurnia Finalistya. Penelitian ini mengungkap dinamika politik yang terjadi mengiringi dan interaksi antar aktor politik yang terlibat dalam setiap proses tata kelola anggaran di Desa Kemukus dalam usaha mewujudkan demokrasi ekonomi lokal yang menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan amanat UU Desa. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif studi kasus yang berusaha untuk menjelaskan dan mendeskripsikan sebuah fenomena yang terjadi melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan, penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi di Desa Kemukus masih terbatas pada aspek prosedural dan belum mencapai tingkat yang diharapkan. Kurangnya *political will* dari pemerintah desa menjadi kendala utama dalam menjalankan mekanisme tata kelola anggaran yang akuntabel dan transparan. Contoh kegagalan proyek pembangunan, seperti kolam pemancingan Galatama, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ini belum sepenuhnya diimplementasikan. Politik lokal, terutama setelah Pilkades 2019, juga mempengaruhi penerapan akuntabilitas dan transparansi dengan kurangnya ruang untuk persaingan politik yang seimbang. Gagalnya pemerintah desa menyediakan mekanisme *check and balance* berdampak negatif pada tata kelola anggaran di Desa Kemukus. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti perlunya meningkatkan implementasi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi guna memastikan pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Tata Kelola Anggaran

ABSTRACT

This research seeks to explain the implementation of the principles of accountability and transparency in budget management in Kemukus Village under the leadership of Village Head Kurnia Finalistya. This research reveals the political dynamics that accompany and interact between political actors involved in every budget management process in Kemukus Village in an effort to realize local economic democracy that applies the principles of accountability and transparency in accordance with the mandate of the Village Law. The method used in this research is a qualitative case study method which attempts to explain and describe a phenomenon that occurs through interviews, observation and documentation. This research shows that although there have been efforts to follow established procedures, the implementation of the principles of accountability and transparency in Kemukus Village is still limited to procedural aspects and has not reached the expected level. The lack of political will from the village government is the main obstacle in implementing an accountable and transparent budget management mechanism. Examples of failed development projects, such as the Galatama fishing pond, show that these principles have not been fully implemented. Local politics, especially after the 2019 Village Head Election, also affects the implementation of accountability and transparency with a lack of space for balanced political competition. The failure of the village government to provide a check and balance mechanism has a negative impact on budget governance in Kemukus Village. Therefore, this research highlights the need to increase the implementation of accountability and transparency principles to ensure budget management that is more effective and responsive to community needs

Key Words: Accountability, Transparency, Budget Management